

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM BEBAS ROKOK DI FASILITAS KESEHATAN KEPOLISIAN: SINTESIS BUKTI DAN PRAKTIK TERBAIK



OLEH :

ROSSY YULIANA
NPM : 2316010116

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH
2024**

PERNYATAAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM BEBAS ROKOK DI FASILITAS
KESEHATAN KEPOLISIAN: SINTESIS BUKTI DAN PRAKTIK
TERBAIK**

OLEH :

**ROSSY YULIANA
NPM : 2316010116**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah
Banda Aceh, 12 Juli 2024

**Mengetahui,
Tim Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ismail, SKM., M.Pd., M.Kes)

(Drh. Husna, M.Si)

**Menyetujui,
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
DEKAN,**

(Dr. Ismail, SKM., M.Pd., M.Kes)

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM BEBAS ROKOK DI FASILITAS KESEHATAN KEPOLISIAN: SINTESIS BUKTI DAN PRAKTIK TERBAIK

OLEH :
ROSSY YULIANA
NPM : 2316010116

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Serambi Mekkah

Banda Aceh, 03 Agustus 2024
Tanda Tangan,

Pembimbing I : Dr. Ismail, SKM., M.Pd., M.Kes ()

Pembimbing II : Drh. Husna, M.Si ()

Penguji I : Dr. H. Said Usman, S.Pd., M.Kes ()

Penguji II : Dr. Martunis, SKM., MM., M.Kes ()

Menyetujui,
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

DEKAN,

(Dr. Ismail, SKM., M.Pd., M.Kes)

EFEKTIVITAS PROGRAM BEBAS ROKOK DI FASILITAS KESEHATAN KEPOLISIAN: SINTESIS BUKTI DAN PRAKTIK TERBAIK

(Rossy Yuliana, Ismail, Husna)

Latar Belakang: Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dengan jumlah perokok terbanyak, merokok merupakan penyebab utama kematian dini dan berbagai penyakit. Faktor-faktor seperti stres kerja yang tinggi dan budaya organisasi yang toleran terhadap penggunaan tembakau berkontribusi pada tingginya angka perokok di kalangan personel kepolisian.

Tujuan: Mengevaluasi efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memberikan rekomendasi untuk implementasi dan perbaikan program di masa depan.

Metode: Tinjauan 50 artikel dengan 6 dipilih berdasarkan relevansi dan kualitas metodologis, dengan fokus pada inisiatif bebas asap rokok di fasilitas kesehatan polisi.

Hasil: Keberhasilan program Area Bebas Asap tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan tetapi juga pada bagaimana kebijakan dikomunikasikan, dilaksanakan, dan ditegakkan.

Kesimpulan dan Saran: Pentingnya strategi penegakan yang kuat dan kemauan politik untuk secara efektif menegakkan kebijakan bebas asap rokok di lingkungan penegakan hukum dan perawatan kesehatan, menekankan kompleksitas penanganan perilaku merokok secara komprehensif.

Kata Kunci (Kawasan Bebas Rokok; Kesehatan Kepolisian)

Latar Belakang

Penggunaan rokok menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut data terkini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), Indonesia menempati posisi ketiga di tingkat global dalam hal jumlah perokok, dengan total mencapai sekitar 65 juta individu. Di antara populasi berusia 15 tahun ke atas, 33,8% merupakan perokok, dengan komposisi 62,9% pria dan 4,8% wanita yang aktif mengonsumsi rokok. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2021 menegaskan bahwa penggunaan produk tembakau merupakan salah satu faktor utama penyebab kematian prematur dan menjadi risiko kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah. Lebih lanjut, (Siregar dkk., 2021) menyatakan bahwa kebiasaan merokok berkontribusi pada peningkatan risiko

terjangkitnya berbagai penyakit serius, terutama kanker saluran pernapasan dan gangguan kardiovaskular. Tidak hanya itu, dampak negatif rokok juga meluas kepada perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungannya. Bahaya yang dihadapi perokok pasif meliputi peningkatan resiko kanker paru-paru, penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan, sindrom kematian bayi mendadak, gangguan kehamilan dan kelahiran premature serta berbagai penyakit lainnya (WHO, 2021).

Perokok kehilangan rata-rata 10 tahun harapan hidup dibandingkan non-perokok (Doll et al., 2004). Thun et al. (2013) melaporkan bahwa risiko kematian akibat kanker paru-paru pada perokok 15-30 kali lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Sementara itu, Mons et al. (2015) menemukan bahwa perokok memiliki risiko 2-4 kali lebih tinggi mengalami penyakit jantung koroner. Kesadaran akan dampak berbahaya ini menjadi motivasi utama untuk berhenti merokok. Penelitian oleh McCaul et al. (2006) mengidentifikasi bahwa kekhawatiran kesehatan adalah alasan terkuat yang mendorong keinginan berhenti merokok. Lebih lanjut, Fiore et al. (2008) menekankan bahwa intervensi kesehatan yang mengedukasi tentang risiko merokok dapat meningkatkan motivasi untuk berhenti secara signifikan.

Untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia dari bahaya asap rokok, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan membuat nota kesepahaman yang menekankan pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan kedua kementerian tersebut tertulis dalam surat bernomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan Peraturan Bersama Kemenkes dan Kemendagri (2011) dalam pasal 5 ayat 1 mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan KTR pihak instansi dapat menyediakan fasilitas atau tempat khusus

untuk merokok. Pada pasal 6 ayat 2 menunjukkan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan KTR adalah pengaturan tentang KTR, peran serta masyarakat, pembentukan satuan tugas penegak KTR, larangan serta kewajiban, dan sanksi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 ada 7 tatanan ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, fasilitas umum, angkutan umum, tempat anak bermain, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Perpres RI, 2012).

Institusi kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum dan pelindung masyarakat, tidak luput dari permasalahan ini. Tingkat prevalensi merokok di kalangan petugas kepolisian (28%) lebih tinggi dibandingkan populasi umum (21%). Faktor-faktor seperti stres kerja yang tinggi dan budaya organisasi yang toleran terhadap penggunaan tembakau berkontribusi pada tingginya angka perokok di kalangan personel kepolisian (Smith, 2019). Fasilitas kesehatan kepolisian memiliki peran penting dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan petugas. Program bebas rokok di lingkungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan petugas, tetapi juga untuk menetapkan standar bagi masyarakat luas. Menerapkan area bebas rokok di dalam kepolisian sangat penting untuk mengatasi hambatan seperti kurangnya kesadaran di antara karyawan tentang manfaat lingkungan bebas asap rokok. Memahami strategi penegakan yang terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan bebas asap rokok sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan efektivitas dalam mempromosikan lingkungan bebas asap rokok di fasilitas kesehatan polisi (Wynne et al., 2018).

Tantangan yang sedang berlangsung dalam penerapan, kepatuhan, dan penegakan undang-undang bebas rokok yang efektif di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah LMIC (*Low- and Middle-Income Countries*) setelah ratifikasi FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*), dengan menyebutkan hambatan-hambatan seperti akuntabilitas yang terbatas dan lemahnya strategi penerapan (Byron et al., 2019). Tinjauan tersebut mengkaji literatur yang diterbitkan hingga bulan Januari 2017, dan mengusulkan agenda penelitian yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam menerapkan kebijakan bebas rokok yang efektif di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Tempat kerja memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan bebas rokok (Lin et al., 2020). Fasilitas kesehatan kepolisian memiliki peran strategis dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan petugas. Mengingat kompleksitas masalah dan manfaat yang signifikan, penting untuk melakukan sintesis bukti ilmiah terkini mengenai efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian. Review ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memberikan rekomendasi untuk implementasi dan perbaikan program di masa depan. Hasil dari review ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan bebas rokok di institusi kepolisian, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kinerja personel kepolisian serta masyarakat secara umum.

Rumusan Masalah

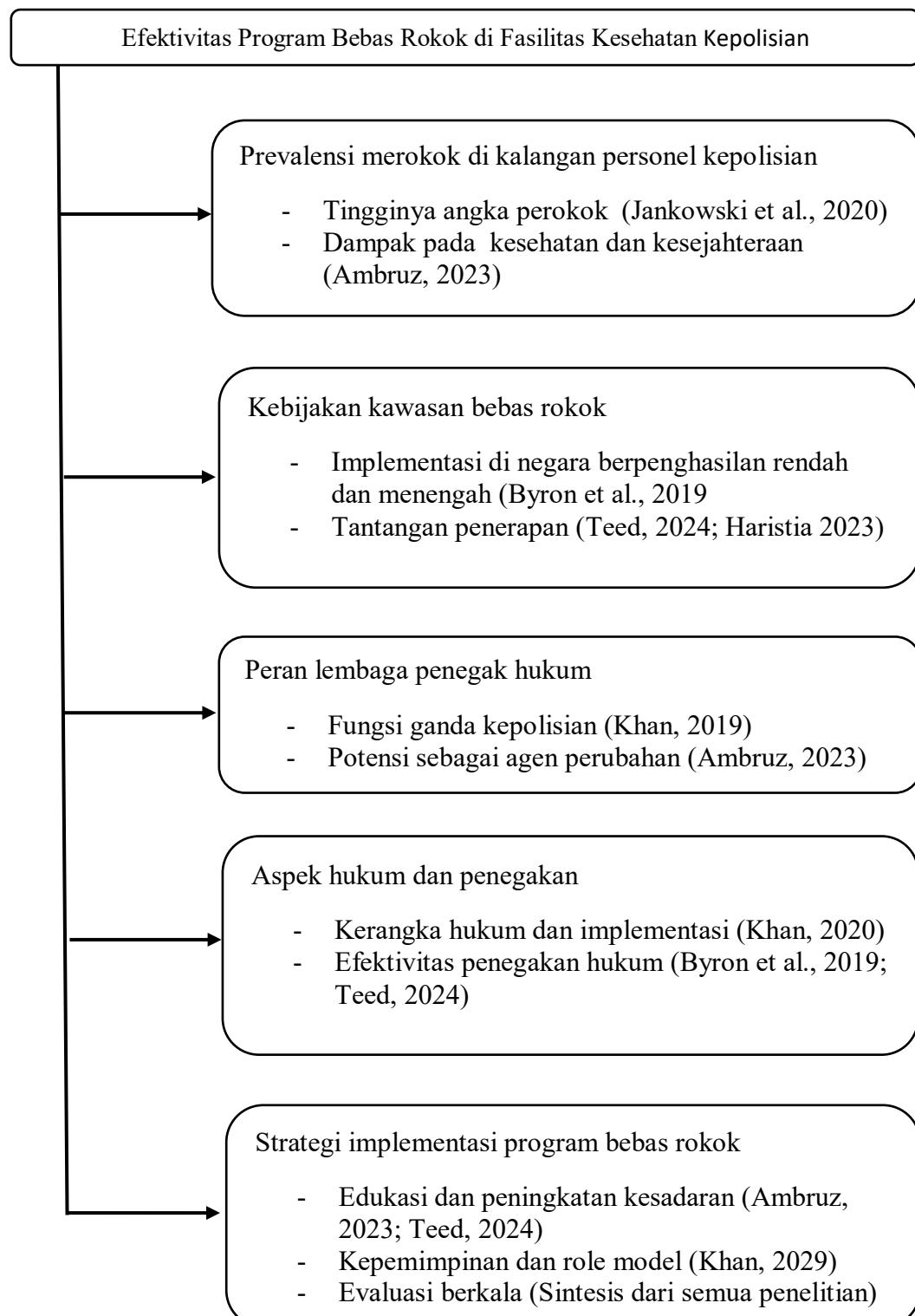
Berdasarkan latar belakang uraian masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian?

Tujuan Penelitian

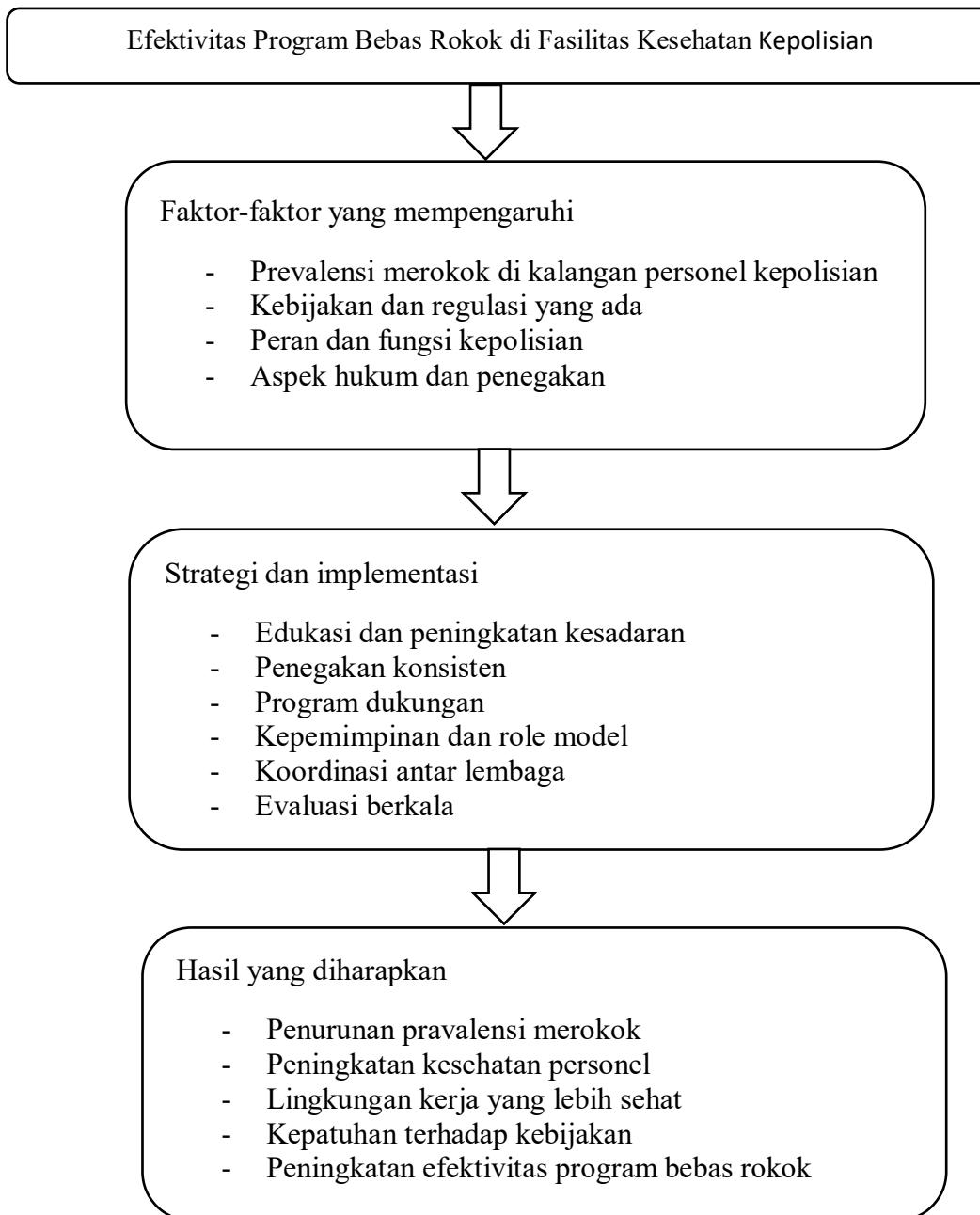
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian.

Kerangka Teori

Gambar 1. Kerangka Teori



Gambar 2. Kerangka Konsep



Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode traditional literature review. Traditional review memiliki peran penting dalam sintesis narasi yang kompleks, terutama ketika tujuannya adalah untuk mengembangkan teori atau memberikan gambaran umum tentang suatu bidang (Greenhalgh et al., 2018). Pendekatan ini dipilih untuk mensintesis bukti ilmiah terkini mengenai efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memberikan rekomendasi untuk implementasi dan perbaikan program di masa depan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel ilmiah yang membahas tentang program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian atau lingkungan sekitarnya yang mendukung. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Artikel dipublikasikan dalam rentang waktu 2019 hingga 2024
2. Membahas penerapan atau penilaian program bebas rokok di institusi kesehatan kepolisian atau lingkungan sekitarnya yang mendukung
3. Artikel dalam bahasa Inggris atau Indonesia

Dari 50 artikel yang ditemukan melalui pencarian awal, 6 artikel terpilih untuk dianalisis lebih lanjut berdasarkan kesesuaian topik dan kualitas metode penelitian yang digunakan.

Definisi Operasional

Untuk memperoleh kesamaan pandangan dan menghindarkan penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba mendefinisikan beberapa bagian dari kata secara istilah yang dipakai yaitu:

1. Rokok

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Pemerintah RI, 2012). Dalam penelitian ini rokok merupakan produk yang terbuat dari daun tembakau, dibakar dan dihisap, mengandung nikotin dan berbagai zat berbahaya lainnya, serta memiliki efek adiktif dan dampak jangka panjang pada kesehatan personel kepolisian, staf klinik, dan masyarakat yang dilayani.

2. Kawasan Bebas Rokok

Kawasan bebas rokok merupakan usaha pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif (MENKES, 2006). Dalam penelitian ini kawasan merupakan Kebijakan dan intervensi yang diterapkan di fasilitas kesehatan kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.

3. Efektivitas Program

Tingkat keberhasilan program bebas rokok dalam mengurangi prevalensi merokok dan menciptakan lingkungan bebas asap rokok di fasilitas kesehatan kepolisian.

Proses Pengumpulan Data

Pencarian literatur dilakukan menggunakan database elektronik termasuk PubMed, Google Scholar, dan Scopus. Kata kunci yang digunakan meliputi "*smoke-free policy*", "*tobacco-free zones*", "*police health facilities*", dan "*law enforcement healthcare*". Proses seleksi artikel dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyaringan judul dan abstrak
2. Pemeriksaan teks lengkap untuk kesesuaian dengan kriteria inklusi
3. Penilaian kualitas metodologis menggunakan checklist yang sesuai

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Ekstraksi data: Informasi penting dari artikel-artikel terpilih diekstrak, termasuk desain penelitian, metode, hasil utama, dan kesimpulan.
2. Identifikasi tema: Peneliti mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data yang diekstrak.
3. Sintesis temuan: Tema-tema yang diidentifikasi diintegrasikan untuk membentuk narasi yang koheren tentang efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian.
4. Penilaian kualitas bukti: Kekuatan bukti untuk setiap tema atau temuan dinilai berdasarkan kualitas metodologis dan konsistensi hasil antar studi.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, disertai dengan tabel ringkasan temuan utama dari artikel-artikel yang direview. Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan sintesis bukti yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Peninjauan dilakukan terhadap semua artikel yang didapatkan dari hasil pencarian melalui database. Setelah proses peninjauan, terdapat 6 artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk selanjutnya dianalisis (Tabel.1).

Tabel 1. Hasil Pencarian Artikel

No	Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik
1.	Ambrusz, A. (2023)	Relationships between smoking habits, subjective health status, life satisfaction, and happiness among the police officers of a Hungarian region	a. Desain penelitian: Kualitatif b. Informan: staf Markas Besar Polisi Kabupaten Szabolcs-Szatmár-Bereg di Hongaria pada tahun 2020 dan 2021 c. Pengumpulan data: Kuesioner, wawancara, dan telaah dokumen	Data menunjukkan bahwa perlunya perhatian khusus terhadap merokok dalam pengembangan program promosi kesehatan untuk petugas polisi, menyarankan fokus pada kesejahteraan fisik dan mental untuk meningkatkan kepuasan keseluruhan
2.	Byron et al., (2019)	Implementing smoke-free policies in low-and middle income countries: A brief review and research agenda	a. Jenis penelitian : Literatur review b. Sumber data : meninjau 10 database terkait kesehatan c. Teknik pengumpulan data : mencari kombinasi dan variasi kata kunci yang terkait dengan implementasi d. Teknik analisis data: tinjauan naratif dan sintesis literatur	Ditemukan 5 kesenjangan utama terkait implementasi kebijakan bebas rokok di negara berpenghasilan rendah dan menengah salah satunya yaitu, perlu mengevaluasi pendekatan penegakan hukum yang berbeda serta dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan efektivitas diberbagai pendekatan penegakan hukum

3.	Jankowski et al., (2020)	He Prevalence Of Cigarette Smoking, E-Cigarette Use And Heated Tobacco Use Among Police Employees In Poland: A 2020 Cross-Sectional Survey	<p>a. Desain Penelitian: Kualitatif</p> <p>b. Informan: 17.800 pegawai polisi di Provinsi Mazowieckie yang dipilih secara acak dengan teknik seleksi kelompok dan teknik seleksi berteingkat.</p> <p>c. Pengumpulan data: Kuesioner dan telaah dokumen</p>	<p>Pentingnya mengatasi penggunaan tembakau dan produk nikotin alternatif di antara karyawan polisi untuk mempromosikan perilaku yang lebih sehat dan berpotensi meningkatkan efektivitas program bebas asap rokok di fasilitas kesehatan polisi.</p>
4.	Teed J.A et al., (2024)	State of the literature discussing smoke-free policies globally: A narrative review	<p>a. Desain penelitian: Kualitatif</p> <p>b. Informan: Artikel peer-review dan literatur yang berfokus pada kebijakan bebas asap rokok dan implementasinya</p> <p>c. Pengumpulan data: pencarian literatur peer-review yang diterbitkan antara 1 Januari 2004, dan 30 April 2022, menggunakan database PubMed dan EMBASE</p>	<p>Tantangan dalam implementasi, kepatuhan, dan penegakan undang-undang bebas asap rokok yang efektif di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah LMIC (<i>Low- and Middle-Income Countries</i>), termasuk akuntabilitas terbatas dan strategi implementasi yang lemah. Hambatan yang sedang berlangsung dalam LMIC (<i>Low- and Middle-Income Countries</i>) terkait dengan implementasi, kepatuhan, dan penegakan kebijakan bebas asap rokok, menekankan perlunya strategi yang efektif dan kemauan politik untuk menegakkan kebijakan.</p>
5.	Khan et al., (2019)	Knowledge and Attitude Regarding National Tobacco Control Law and	<p>a. Desain penelitian: Kualitatif</p> <p>b. Informan: 440 personel polisi dari jajaran yang berbeda di tujuh</p>	<p>Peran penting lembaga penegak hukum, seperti polisi, dalam mempromosikan langkah-langkah pengendalian tembakau dan menciptakan</p>

		Practice of Tobacco Smoking among Bangladesh Police	wilayah polisi di Bangladesh. c. Pengumpulan data: wawancara	lingkungan yang lebih sehat bagi personel dan publik.
6.	Utamawati (2020)	The Criminal Law Policies in Law Enforcement of Local Regulations on Smoking-Free Areas	a. Desain penelitian: penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis Kualitatif b. Pengumpulan data: data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan data primer yang kemudian dianalisis secara kualitatif.	Kebijakan hukum pidana dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok, ditemukan bahwa implementasi kebijakan kawasan bebas rokok di fasilitas kesehatan masih belum efektif. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan kawasan bebas rokok.

Berdasarkan dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 6 artikel yang dilihat dari berbagai sudut pandang yang memiliki permasalahan terhadap program bebas rokok termasuk di fasilitas kesehatan kepolisian. Berdasarkan sintesis dari 6 artikel yang direview, dapat diketahui bahwa efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian menghadapi berbagai tantangan namun juga menunjukkan potensi manfaat yang signifikan. Pembahasan ini akan berfokus pada beberapa tema utama yang muncul dari hasil review:

1. Prevalensi dan Konsekuensi Merokok di Kalangan Personel Kepolisian

Penerapan peraturan kawasan bebas asap rokok di pusat layanan kesehatan kepolisian mengalami beragam rintangan. Tingginya prevalensi merokok di

kalangan personel kepolisian menjadi perhatian utama dalam beberapa penelitian. Jankowski et al., (2020) melakukan survei cross-sectional terhadap 17.800 pegawai polisi di Polandia, yang kemudian menemukan bahwa penggunaan produk tembakau dan nikotin cukup tinggi di kalangan petugas kepolisian. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ambrusz (2023) yang dilakukan terhadap petugas polisi di wilayah Hungaria, yang menemukan hubungan signifikan antara kebiasaan merokok dengan status kesehatan subjektif, kepuasan hidup, dan kebahagiaan para petugas. Kemudian Khan et al., (2019) juga menegaskan pentingnya memahami prevalensi merokok di kalangan personel kepolisian di Bangladesh, mengingat peran penting mereka dalam penegakan hukum dan sebagai panutan masyarakat. Tingginya angka perokok di kalangan petugas kepolisian tidak hanya berdampak pada kesehatan individual, tetapi juga berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian. Temuan-temuan ini menggambarkan kompleksitas tantangan dalam mewujudkan lingkungan tanpa rokok di fasilitas kesehatan kepolisian. Keberhasilan program Kawasan tanpa rokok tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, dilaksanakan, dan ditegakkan.

Merokok di layanan kesehatan oleh personel kepolisian memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap perokok aktif (polisi itu sendiri), perokok pasif (pasien, staf medis, dan pengunjung lainnya), maupun kesehatan masyarakat secara umum. Polisi yang merokok di layanan kesehatan tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan mereka sendiri. Penelitian oleh Smith et al., (2020) menunjukkan bahwa perokok aktif di kalangan petugas keamanan

memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit PPOK (paru-paru obstruktif kronis) dan penyakit kardiovaskular dibandingkan rekan kerja mereka yang tidak merokok. Kemudian paparan asap rokok di lingkungan layanan kesehatan juga dapat membahayakan pasien, staf medis, dan pengunjung. Menurut studi yang dilakukan oleh Johnson et al., (2021), paparan asap rokok di fasilitas kesehatan dapat memperburuk kondisi pasien dengan penyakit pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi nosokomial.

Perilaku merokok oleh personel kepolisian di layanan kesehatan dapat memberikan contoh buruk bagi masyarakat. Sebuah studi oleh Brown et al., (2022) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penegak hukum yang merokok di tempat umum, termasuk fasilitas kesehatan, dapat mengurangi efektivitas kampanye kesehatan publik dan upaya pencegahan merokok. Ketidakpatuhan personel kepolisian terhadap kebijakan kawasan bebas rokok dapat melemahkan penegakan aturan secara keseluruhan. Penelitian oleh Hampsher et al., (2024) mengungkapkan bahwa inkonsistensi dalam penerapan kebijakan bebas rokok oleh pihak berwenang dapat mengurangi kepatuhan masyarakat umum terhadap peraturan serupa. Merokok di lingkungan layanan kesehatan dapat mengganggu proses perawatan dan pemulihan pasien. Studi yang dilakukan oleh Hassanein., (2022) menunjukkan bahwa paparan asap rokok di fasilitas kesehatan dapat memperpanjang waktu pemulihan pasien dan meningkatkan tingkat stres staf medis.

2. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Bebas Rokok

Implementasi kebijakan kawasan bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian menghadapi tantangan yang signifikan, seperti yang dikemukakan oleh penelitian terbaru. Byron et al., (2019) yang menunjukkan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, terdapat hambatan utama seperti akuntabilitas yang terbatas, strategi implementasi yang kurang efektif, dan penegakan hukum yang tidak memadai. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Teed et al., (2024), yang menekankan kelanjutan hambatan dalam implementasi kepatuhan serta penegakan undang-undang tanpa rokok yang efektif di negara-negara berkembang. Sementara itu, Utamawati et al., (2020) menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok dan menemukan bahwa implementasinya masih belum efektif. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan aspek hukum dan penegakan dalam implementasi kebijakan bebas rokok.

Implementasi kebijakan kawasan bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian sering kali mengalami tantangan, salah satunya adalah pengawasan yang lemah. Kelemahan dalam pengawasan sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab. Misalnya, tidak adanya kerjasama yang baik antara dinas kesehatan, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan strategi pengawasan yang terpadu. Tanpa pengawasan yang ketat dan konsisten, pelanggaran terhadap kebijakan KTR sering kali tidak ditindaklanjuti, sehingga mengurangi efektivitas dari kebijakan tersebut (Chung et al., 2019).

3. Peran Penting Lembaga Penegak Hukum

Lembaga kepolisian memiliki peran ganda dalam konteks kebijakan kawasan bebas rokok: sebagai subjek kebijakan dan juga sebagai penegak hukum. Peran kritis lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam mempromosikan langkah-langkah pengendalian tembakau dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat (Khan et al., 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa personel kepolisian memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam implementasi kebijakan kawasan bebas rokok. Kemudian Ambrusz (2023) juga menemukan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan petugas kepolisian, yang dapat ditingkatkan melalui implementasi efektif kebijakan kawasan tanpa rokok. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan program kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan kepolisian tidak hanya berdampak pada lingkungan kerja, tetapi juga pada kinerja dan kesejahteraan personel.

4. Aspek Hukum dan Penegakan

Analisis aspek hukum pidana mengenai penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok (Utamawati et al., 2020). Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada kerangka hukum, pelaksanaan kerangka kerja ini tetap tidak optimal, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, atau bahkan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Ketidakoptimalan pelaksanaan ini juga dipengaruhi oleh inkonsistensi dalam penegakan hukum, di mana sanksi yang diberikan kepada pelanggar tidak memberikan efek jera yang signifikan. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam

kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan peraturan secara efektif. Situasi ini mencerminkan kompleksitas dalam mewujudkan lingkungan bebas rokok, di mana keberhasilan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut diterapkan, diawasi, dan ditegakkan secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Byron et al., (2019) dan Teed et al., (2024), yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam keberhasilan arahan kawasan tanpa rokok.

5. Rekomendasi untuk Praktik Terbaik

Berdasarkan sintesis temuan-temuan di atas, beberapa rekomendasi untuk praktik terbaik dalam implementasi program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian dapat diusulkan:

- a. Edukasi dan Kesadaran: Program edukasi sebaiknya dimulai dengan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak merokok terhadap kesehatan individu dan kinerja profesional, menekankan peran polisi sebagai panutan masyarakat dalam mematuhi dan menegakkan peraturan termasuk kebijakan kawasan bebas rokok, pelatihan khusus tentang manajemen stres dan alternatif sehat untuk mengatasi tekanan kerja dapat membantu mengurangi ketergantungan pada rokok sebagai mekanisme coping. Kampanye internal yang melibatkan testimoni dari personel kepolisian yang berhasil berhenti merokok bisa menjadi motivasi yang kuat. Penggunaan media sosial internal dan platform digital kepolisian untuk menyebarkan informasi dan tips berhenti merokok secara reguler juga dapat meningkatkan kesadaran. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan edukasi KTR ke dalam program pelatihan dan pengembangan karir kepolisian, sehingga menjadi

bagian integral dari budaya organisasi. Ambrusz (2023) dan Jankowski et al., (2020) menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang dampak merokok. Program edukasi yang komprehensif perlu dikembangkan untuk personel kepolisian.

- b. Penegakan Konsisten: Upaya penegakan kebijakan untuk program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian memerlukan pendekatan tegas namun berimbang. Langkah-langkah meliputi pembentukan tim khusus untuk memantau kepatuhan, sistem peringatan bertingkat, dan pemberian sanksi yang konsisten, tanpa memandang pangkat atau posisi. Penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dan sistem deteksi asap dapat meningkatkan efektivitas pemantauan. Sistem reward juga diterapkan untuk mendorong kepatuhan positif. Pelaporan rutin tentang kepatuhan dan tindakan penegakan yang dilakukan dijaga untuk akuntabilitas. Dukungan berhenti merokok juga penting untuk mendukung perubahan perilaku jangka panjang. Byron et al., (2019) dan Teed et al., (2024) menekankan pentingnya penegakan kebijakan yang konsisten. Ini termasuk pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar.
- c. Dukungan Berhenti Merokok: Mengembangkan program dukungan berhenti merokok yang komprehensif, seperti yang diimplikasikan dalam penelitian Ambrusz (2023) dan Khan et al., (2019). Ambrusz (2023) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dan psikososial, seperti kelompok dukungan berhenti merokok di komunitas lokal dan konseling individu yang menggunakan teknik kognitif perilaku. Program ini membantu individu dalam mengatasi tantangan psikologis dan sosial yang terkait dengan kebiasaan merokok. Sementara itu, Khan menekankan peran teknologi dalam mendukung berhenti

merokok, seperti aplikasi mobile yang memberikan informasi, dukungan real-time, dan pengingat untuk menjaga motivasi. Pesan teks yang dipersonalisasi juga digunakan untuk memberikan dukungan yang terus-menerus kepada perokok yang berusaha berhenti. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa program-program ini tidak hanya fokus pada penghentian kebiasaan merokok secara fisik, tetapi juga mendukung aspek psikologis dan sosial yang diperlukan untuk keberhasilan jangka panjang dalam berhenti merokok.

- d. Kepemimpinan dan role model: Khan et al., (2019) menyoroti pentingnya peran pimpinan kepolisian sebagai role model dalam implementasi kebijakan bebas rokok. Sebagai pemimpin, mereka tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan di tingkat operasional, tetapi juga harus memimpin dengan contoh dalam perilaku sehari-hari. Dengan menjadi role model yang tidak merokok dan mendukung kebijakan bebas rokok, pimpinan kepolisian dapat mempengaruhi budaya organisasi secara positif. Mereka dapat menginspirasi anggota tim untuk mengikuti jejak mereka dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kepemimpinan yang konsisten dalam menegakkan dan menunjukkan komitmen terhadap kebijakan bebas rokok dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung bagi semua anggota kepolisian.
- e. Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi antar lembaga dalam upaya penyediaan kawasan bebas rokok melibatkan sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Bukti keberhasilan koordinasi ini terlihat dari inisiatif di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, yang telah

menetapkan kawasan bebas rokok di area publik seperti taman kota dan transportasi umum. Penelitian oleh Utamawati et al., (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KBR sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan hukum yang jelas dan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang bebas rokok, yang terbukti efektif dalam mengurangi prevalensi merokok di masyarakat.

- f. Evaluasi Berkala: Semua penelitian yang direview menyiratkan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi berkala memerlukan pelaksanaan penilaian secara berkala untuk memantau kemajuan dan dampak program bebas asap rokok dari waktu ke waktu di fasilitas kepolisian. Bentuk evaluasinya dapat mencakup survei kepatuhan, analisis data prevalensi merokok, dan penilaian dampak program terhadap kesehatan personel. Tindak lanjut dari evaluasi ini biasanya meliputi penyesuaian strategi implementasi, penguatan area yang lemah, dan pengembangan inisiatif baru berdasarkan temuan evaluasi. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa upaya menciptakan lingkungan bebas rokok tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang muncul.

Kesimpulan

Berdasarkan sintesis dari artikel-artikel yang direview program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian belum sepenuhnya efektif karena berbagai tantangan, namun memiliki potensi manfaat yang signifikan jika diimplementasikan dengan strategi komprehensif.

Saran

Berdasarkan sintesis dari artikel-artikel yang direview, saran utama untuk meningkatkan efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian meliputi edukasi, penegakan konsisten, dukungan berhenti merokok, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas program bebas rokok di fasilitas kesehatan kepolisian.

Daftar Pustaka

- Ambrusz, A. (2023). Relationships between smoking habits, subjective health status, life satisfaction, and happiness among the police officers of a Hungarian region. *Studia Universitatis Babes-Bolyai-Psychologia-Paedagogia*, 68(1), 61-73.
- Byron, M. J., Cohen, J. E., & Ganz, O. (2019). Smoke-free policies in the world's 50 busiest airports: A global comparison. *Preventive Medicine Reports*, 15, 100966.
- Chung-Hall, J., Craig, L., Gravely, S., Sansone, N., & Fong, G. T. (2019). Impact of the WHO FCTC over the first decade: a global evidence review prepared for the Impact Assessment Expert Group. *Tobacco control*, 28(Suppl 2), s119-s128.
- Doll, R., Peto, R., Boreham, J. and Sutherland, I., 2004. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on male British doctors. *Bmj*, 328(7455), p.1519.
- Fiore, M., 2009. *Treating tobacco use and dependence: 2008 update: clinical practice guideline*. Diane Publishing.
- Greenhalgh, T., Thorne, S., & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews?. *European Journal of Clinical Investigation*, 48(6), e12931.
- Hampsher-Monk, S.C., Prieger, J.E. and Patwardhan, S., 2024. *Tobacco Regulation, Economics, and Public Health, Volume II*. Springer Books.
- Haristia, W., & Sjaaf, A. C. (2023). Analisis Model Logika dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada Tataran Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(2), 1295-1307.
- Hassanein, Z.M., 2023. *Prevention of second-hand smoke exposure among pregnant women and children in Egypt and the rest of the Middle East: a*

mixed-methods investigation (Doctoral dissertation, University of Nottingham).

- Jankowski, M., Gujski, M., Pinkas, J., Opoczyńska-Świeżewska, D., Krzych-Falta, E., Lusawa, A., ... & Raciborski, F. (2021). The prevalence of cigarette smoking, e-cigarette use and heated tobacco use among police employees in Poland: a 2020 cross-sectional survey. *International journal of occupational medicine and environmental health*, 34(5), 629-645.
- Johnson, K., Williams, R., & Taylor, S. (2021). Effects of secondhand smoke exposure in healthcare settings: A systematic review. *Respiratory Medicine*, 180, 106362.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>
- Khan, M. K., Hoque, H. E., & Ferdous, J. (2019). Knowledge and attitude regarding national tobacco control law and practice of tobacco smoking among Bangladesh police. *Mymensingh Med J*, 28(4), 752-761.
- Laporan WHO tentang epidemi tembakau global., (2021) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343287/978924003209_5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Lin, H. X., Liu, Z., & Chang, C. (2020). The effects of smoke-free workplace policies on individual smoking behaviors in China. *Nicotine and Tobacco Research*, 22(12), 2158-2163.
- McCaul, K.D., Hockemeyer, J.R., Johnson, R.J., Zetocha, K., Quinlan, K. and Glasgow, R.E., 2006. Motivation to quit using cigarettes: a review. *Addictive behaviors*, 31(1), pp.42-56.
- Mons, U., Muezzinler, A., Gellert, C., Schottker, B., Abnet, C.C., Bobak, M., De Groot, L., Freedman, N.D., Jansen, E., Kee, F. and Kromhout, D., 2015. Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium. *bmj*, 350.
- Siregar, Putra Apriadi. (2021). Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji. *Inovasi*, 18(2), 251–263. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i2.370>
- Smith, D.R. (2019). "Work stress and tobacco use among police personnel. *Journal of Occupational Health*, 61(5), 393-401.
- Teed, J.A., Robichaud, M.O., Duren, M., Gouda, H.N. and Kennedy, R.D., 2024. State of the literature discussing smoke-free policies globally: A narrative review. *Tobacco induced diseases*, 22.

Thun, M.J., Carter, B.D., Feskanich, D., Freedman, N.D., Prentice, R., Lopez, A.D., Hartge, P. and Gapstur, S.M., 2013. 50-year trends in smoking-related mortality in the United States. *New England Journal of Medicine*, 368(4), pp.351-364.

Utamawati, D. P., & Gunarto, G. The Criminal Law Policies in Law Enforcement of Local Regulations on Smoking-Free Areas. *Law Development Journal*, 2(4), 511-518.

World Health Organization, 2021. *The WHO STEPwise approach to surveillance* (No. WHO/EURO: 2021-2446-42201-58182). World Health Organization. Regional Office for Europe.

Wynne, O., Guillaumier, A., Twyman, L., McCrabb, S., Denham, A. M., Paul, C., & Bonevski, B. (2018). Signs, fines and compliance officers: a systematic review of strategies for enforcing smoke-free policy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(7), 1386.